

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan lembaga atau institusi yang berfungsi sebagai tiang penyangga bekerjanya sistem demokrasi perwakilan. Selama demokrasi perwakilan masih dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka kehadiran partai politik tidak bisa dihindari. Partai politik telah mengubah perspektif hubungan antara rakyat dengan pemerintah.¹ Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya.²

Secara sederhana partai politik merupakan *representation of ideas* yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada *representation of ideas* secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan rakyat, memberikan jalan bagi aspirasi atau pendapat, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi.³

¹ Aris Ananta, *Politik Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 48.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 403-404.

³ Abdul Rahman Mawazi, *Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal, (In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, vol. 6 no. 2, 2017), hal. 138.

Partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, modern, dan mewakili aspirasi rakyat. Di awal perkembangannya, partai politik masih bersifat elitis dan aristokrasi, dimana partai politik hanya mempertahankan kepentingan golongan tertentu saja, kemudian peranan tersebut meluas di setiap elemen masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perlu adanya dukungan dalam semua golongan masyarakat, dengan demikian terjadi pergeseran peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis.

Fungsi dari partai politik adalah bersaing untuk memenangkan pemilihan umum, menampung berbagai aspirasi rakyat, menyediakan alternatif kebijakan, dan mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam kursi pemerintahan. Hal tersebut menuntut sistem demokrasi menjadi sistem politik, karena partai politik menjadi media rakyat untuk menentukan pilihan-pilihan politik hingga kebijakan politik yang menentukan nasib rakyat kedepannya.⁴ Di negara demokrasi, partai politik relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di

⁴ Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 1.

hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai politik tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.⁵

Partai politik di Indonesia mengalami berbagai perubahan sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi politik di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Munculnya partai politik di Indonesia secara resmi berawal dari maklumat tanggal 03 November 1945 dari wakil presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta.⁶ Lahirnya berbagai macam partai politik menjadi awal perkembangan demokrasi di Indonesia, karena partai politik adalah salah satu syarat berjalannya sistem pemerintahan yang demokratis. Di awal pembentukannya, jumlah partai politik di Indonesia sangat banyak dan sistem yang digunakan cenderung multi-partai, yaitu meleburkan satu partai dan menggabungkan diri ke partai lain.⁷

Dinamika partai politik di Indonesia juga sangat baik untuk dijadikan kajian ilmiah, karena partai politik sudah menjadi alat politik untuk melegitimasi kekuasaan yang ada. Terbukti bahwa partai politik juga mempunyai sejarah tersendiri dalam merebut kekuasaan atau hegemoni partai di dalam pemerintahan, atau telah terlihat bahwa lika-liku kehidupan maupun eksistensi partai politik juga sangat disayangkan, tetapi sebagian yang lain sangat patut diapresiasi, dimana berbagai partai politik masih mempertahankan warna partai, *platform*, dan ideologinya, sebagian ada yang sudah “bubar” dan “mati”, ada juga yang mengganti

⁵ Miriam Budiardjo, *Loc cit*, hal. 405.

⁶ Isharyanto, *Partai Politik, Ideologi, Dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), hal. 106.

⁷ H. Rizal Khaerul, S.Ip, M.Si, *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2020 jam 09.23 WIB di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bandung.

nama partainya tetapi ideologinya masih dipertahankan, dan masih banyak partai-partai politik dengan warna-warninya.⁸

Perjalanan politik Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran Golkar (Golongan Karya) sebagai kelompok atau golongan yang bisa dikatakan dekat dengan pemerintahan di masa Orde Baru. Pasca pemilu 1971, Golkar telah berubah menjadi Partai Golkar yang bermisi menguatkan citra politik sebagai partai penguasa yang mempunyai *bargaining position* dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai Golkar sebagai partai senior dan berbagai peranannya yang telah diraih, menjadikan partai Golkar selalu menarik sebagai tempat untuk meniti karir politik.⁹

Sejarah partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan membentuk sebuah panitia yang terdiri dari anggota GMP (Gerakan Militer Pelajar), kelompok cendekiawan, dan militer, untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan”. Pada tanggal 5 Agustus 1964, presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden (Penpres) yang berisi mengenai syarat organisasi-organisasi yang bisa menjadi anggota dari “Front Nasional”. Penpres ini mempersulit organisasi-organisasi tersebut menjadi anggota Front Nasional. Pada 15 Oktober 1964, lima orang anggota Front Nasional dari Golongan Karya mengeluarkan sebuah undangan kepada semua organisasi yang dimaksudkan oleh Penpres No. 1963 tahun 1964.¹⁰

⁸ Isharyanto, *Op cit*, hal. 23.

⁹ Sofyanudin Syarif, Sm.Hk., *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2020 jam 14.00 WIB di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bandung.

¹⁰ Leo Surya Dinata, *Golkar Dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 11.

Pada malam tanggal 19 Oktober 1964, panitia dan wakil-wakil dari 35 organisasi non-afiliasi berkumpul bersama menandatangani suatu piagam. Kemudian pada 20 Oktober, golongan militer, khususnya dari Angkatan Darat bersama dengan puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Panitia ini diketuai oleh Kol. Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-masing adalah Imam Pratigny (NU), J. K. Tumakaka (eks ketua PNI), Djamin Ginting (militer), dan S. Sukowati (Hankam). Berikutnya yaitu Dr. Amino Gondoutomo yang bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris.¹¹ Akhirnya, Sekber Golkar resmi berdiri. Sekber Golkar pertama kali terbentuk atas rencana dari Jenderal A. H. Nasution bersama rekan-rekannya di TNI, pada mulanya adalah sebuah federasi yang begitu longgar yang bertujuan untuk mengimbangi eksistensi PKI di Indonesia.¹²

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹³ Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini

¹¹ Leo Surya Dinata, *Ibid*, hal. 15.

¹² Sofyanudin Syarif, Sm.Hk., *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2020 jam 14.00 WIB di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bandung.

¹³ H. Rizal Khaerul, S.Ip, M.Si, *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2020 jam 09.23 WIB di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bandung.

kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO);
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI);
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR);
4. Organisasi Profesi;
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM);
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI);
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971.¹⁴

KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut serta dalam Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama Golkar, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai saat ini.¹⁵

Peristiwa G30S/PKI menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia maupun bagi Golkar sendiri. Dengan dihentikannya seluruh kegiatan PKI beserta simpatisannya, maka tumbanglah kekuasaan Orde Lama. Bersamaan dengan itu maka lahirlah Orde Baru. Peristiwa ini pun berimbas sekurang-kurangnya pada dua kekuatan politik orde sebelumnya, yaitu penumpasan PKI dan berakhirnya kekuasaan Soekarno. Hancurnya dua kekuatan tersebut berdampak pada perubahan

¹⁴ Sofyanudin Syarif, Sm.Hk., *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2020 jam 14.00 WIB di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bandung.

¹⁵ Akbar Tandjung, *Loc cit*, hal. 12.

struktur politik yang ada, seperti berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin. Bertolak dari peristiwa itulah era kejayaan Orde Baru dimulai.¹⁶

Partai Golkar muncul sebagai organisasi politik dominan dalam pemilu 1971. Setelah itu, hal yang sama terjadi dalam masa-masa pemilu berikutnya. Terlebih setelah pada tanggal 16 Agustus 1982, partai Golkar selalu menjadi “partai *mainstream*” yang tidak terkalahkan. Hal ini tentunya karena partai Golkar semenjak masa pemerintahan Orde Baru merupakan partai pemerintah, ditambah lagi kehadiran militer yang merupakan kekuatan dominan di dalam partai Golkar, dan juga adanya tambahan kekuatan dari birokrat pada saat itu membuat partai Golkar selalu mendapatkan perlakuan istimewa oleh pemerintah dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya.¹⁷

Pada perkembangan berikutnya, di masa Orde Baru muncul adanya kebijakan pengurangan peserta partai politik dan penyeragaman asas partai. Jika pada pemilu 1955 diikuti oleh banyak partai, pada pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik, selanjutnya pada pemilu 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Ini merupakan perkembangan dari gagasan “fusi partai” yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Dalam salah satu konsideran Undang-Undang No.3 tahun 1975 mengenai partai politik dan Golkar disebutkan. “dengan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik tersebut, diharapkan agar partai-partai politik dan Golkar benar-benar dapat menjamin terpeliharanya

¹⁶ Sofyanudin Syarif, Sm.Hk., *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2020 jam 14.00 WIB di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bandung.

¹⁷ Leo Surya Dinata, *Loc cit*, hal. 145.

persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas nasional, serta terlaksananya percepatan proses pembangunan”.¹⁸

Memasuki era Reformasi, ketika pemerintahan Orde Baru tumbang, banyak kalangan yang memprediksikan bakal runtuhnya partai Golkar bersama rezim yang menjadi patron politiknya. Berbagai macam tekanan politik pun dialamatkan kepada partai Golkar. Pada waktu itu partai Golkar di ambang kehancuran dan diprediksikan akan lenyap. Partai Golkar menghadapi hujan politik yang begitu dahsyat, termasuk ada yang menginginkan agar melarang keberadaan partai Golkar. Tantangan lain yang dihadapi Golkar pada era Reformasi adalah kuatnya tekanan eksternal yang menghendaki pembubaran partai Golkar. Sebagai tulang punggung kekuasaan Orde Baru, partai Golkar menjadi sasaran kemarahan dari individu maupun kelompok yang merasa dirugikan oleh sistem pemerintahan Orde Baru. Mereka menuntut agar partai Golkar dibubarkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu selanjutnya.¹⁹

Berangkat dari uraian tersebut, penulis menanggapi bahwa penelitian ini cukup menarik untuk dikaji lebih dalam dan perlu dikembangkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah untuk menambah kajian keilmuan terkait Partai Politik di Indonesia, khususnya partai Golkar. Selain itu, partai politik memiliki peranan yang cukup besar terhadap pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil judul yaitu **“Perkembangan Partai Golkar Di Kota Bandung Tahun 1964-2019”**.

¹⁸ Sofyanudin Syarif, Sm.Hk., *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2020 jam 14.00 WIB di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bandung.

¹⁹ Akbar Tandjung, *Loc cit*, hal. 86.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, akhirnya penulis pun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Partai Golkar di Kota Bandung 1964-2019?
2. Bagaimana Perkembangan Partai Golkar di Kota Bandung 1964-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan sebelumnya, maka penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya Partai Golkar di Kota Bandung tahun 1964-2019;
2. Untuk mengetahui perkembangan Partai Golkar di Kota Bandung 1964-2019.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk penelitian sejarah diperlukan tinjauan pustaka untuk memperkuat makna peristiwa yang sudah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap arsip, buku, maupun karya tulis,

serta sumber lisan yang mendukung peneliti untuk menganalisis penelitiannya.²⁰ Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memperkaya bahan rujukan peneliti dalam menulis penelitiannya sehingga diperoleh hasil penelitian yang komprehensif sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Tahun 2009 dan 2019. Arsip yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar ini membahas terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Partai Golkar di tahun 2009 dan 2019 yang nantinya akan diselaraskan di tingkat provinsi hingga kecamatan;
2. Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kota Bandung terkait Susunan Kepengurusan Masa Bakti 2009-2015 dan 2016-2020. Arsip yang dikeluarkan oleh DPD Partai Golkar Kota Bandung ini menjelaskan susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bandung masa bakti 2009-2015 dan 2016-2020;
3. Hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke-VIII di Tahun 2009 dan ke-IX di Tahun 2016. Buku yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar ini berisi bagaimana hasil Munas Partai Golkar ke-VIII di Pekanbaru, Riau dan ke-IX di Denpasar, Bali. Buku ini juga menjelaskan terkait program kerja dari Partai Golkar yang diselaraskan di tingkat provinsi hingga kecamatan;

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 19.

4. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi* yang ditulis oleh eks ketua umum partai Golkar, yaitu Akbar Tandjung. Buku ini mengulas tentang perjuangan Partai Golkar untuk memperbaiki citra partai pasca Orde Baru, serta perkembangan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Akbar Tandjung dengan paradigma barunya;
5. *Golkar Dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik* yang ditulis oleh Leo Surya Dinata. Buku ini memaparkan sejarah Partai Golkar yang memang berawal dari kalangan militer yang ternyata bisa bertahan hingga saat ini dan juga buku ini menjelaskan tentang budaya politik yang terjadi di Partai Golkar;
6. *Golkar: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika* yang ditulis oleh David Reeve. Buku yang ditulis pada tahun 2013 ini menjelaskan terkait sejarah Partai Golkar yang ternyata banyak yang belum terkuak, serta pemikiran-pemikiran dan dinamika dari para petinggi Partai Golkar saat itu;
7. *Beringin Membangun: Sejarah Politik Partai Golkar* yang ditulis oleh Bahtiar Effendy, Hajriyanto Y. Thohari, Kholid Novianto, dan M. Alfian Alfian. Buku ini menceritakan sejarah dari Partai Golkar dan arah politiknya;
8. *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966* yang ditulis oleh Jahja Muhaimin. Buku ini menjelaskan perkembangan militer dalam kancah perpolitikan di Indonesia tahun 1945-1966,

termasuk sejarah Partai Golkar yang saat itu masih bernama Sekber Golkar;

9. Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan yang ditulis oleh Isharyanto. Buku ini menjelaskan terkait segala hal yang berkaitan dengan partai politik hingga contoh implementasinya;
10. Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998 yang ditulis oleh Jusuf Wanandi. Buku ini menjelaskan memoar-memoar kondisi politik Indonesia di masa Orde Baru yang tentunya saat itu didominasi oleh Partai Golkar sebagai partai “penguasa” di Indonesia;
11. Demokrasi di Bawah Cengkraman Oligarki. Majalah yang diterbitkan oleh Prisma ini menceritakan bagaimana situasi ketika negara yang menganut paham demokrasi dipegang atau dikuasai oleh segelintir oknum-oknum yang mendewakan oligarki sebagai referensi mereka untuk memegang kekuasaan;
12. Dualisme Kepemimpinan Partai Golkar yang ditulis oleh Ach Busairi. Skripsi ini menjelaskan dualisme kepemimpinan di internal Partai Golkar yang pernah terjadi di tahun 2015 antara kubu Aburizal Bakrie (Hasil Munas Bali) dengan kubu Agung Laksono (Hasil Munas Ancol) yang nantinya akan menjadi salah satu referensi dalam penelitian ini;
13. Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia yang ditulis oleh Abdul Rahman Mawazi. Jurnal ini menjelaskan setiap dinamika partai politik dalam sistem presidensial (pasca Dekrit Presiden

5 Juli 1959) di Indonesia, khususnya yang terjadi di tubuh Partai Golkar itu sendiri;

14. Berbagai artikel-artikel yang ditulis dan beredar di internet yang membahas terkait keberadaan Partai Golkar di Kota Bandung.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Metode yang digunakan untuk meneliti Perkembangan Partai Golkar di Kota Bandung adalah menggunakan metode penelitian sejarah. Metode ini merupakan proses menganalisis rekaman peninggalan peristiwa masa lalu termasuk metode dalam menggali, memberi penilaian, mengartikan serta menafsirkan fakta yang ada untuk kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan dari peristiwa tersebut.²¹ Metode ini terdiri dari empat tahap, yaitu Heuristik (pencarian sumber-sumber sejarah), Kritik (penilaian sumber), Interpretasi (penafsiran sejarah), dan Historiografi (penulisan sejarah). Adapun yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Heuristik

Heuristik (pengumpulan sumber) yaitu kegiatan mengumpulkan jejak-jejak atau peristiwa masa lampau. Heuristik merupakan tahapan pertama untuk seorang peneliti dalam menggarap penelitiannya, dengan cara mencari sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber sejarah bisa berupa sumber

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 63.

tertulis, lisan, maupun benda.²² Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis yang mencakup arsip, buku, dokumen, dan karya tulis lainnya, sumber lisan yang berupa wawancara, dan sumber benda yang mencakup foto-foto dari DPD Partai Golkar Kota Bandung. Sumber tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber asli maupun data bukti yang sezaman dengan peristiwa yang terjadi. Sumber primer sering disebut juga dengan sumber atau data langsung, seperti orang, lembaga, struktur organisasi, dsb.²³ Adapun sumber primer yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1) Arsip

- a) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Tahun 2009 dan 2019;
- b) SK Kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bandung Masa Bakti 2009-2015 dan 2016-2020.

2) Buku

- a) Anonymous. 2009. *Hasil Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar;
- b) Anonymous. 2016. *Hasil Munas IX Partai Golkar Tahun 2016*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar;
- c) Akbar Tandjung. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia

²² Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), hal. 36.

²³ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hal. 56.

Pustaka Utama.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang digunakan sebagai pendukung sumber primer atau bisa dikatakan sebagai sumber pelengkap. Sumber sekunder bisa jadi sumber yang ditulis berdasarkan sumber pertama.²⁴ Dalam penelitian ini, sumber sekunder bisa berupa buku, artikel, jurnal, atau karya tulis lainnya yang mendukung dalam penelitian ini, seperti:

1) Buku

- a) Bahtiar Effendy, Hajriyanto Y. Thohari, Kholid Novianto, M. Alfian Alfian, 2012. *Beringin Membangun: Sejarah Politik Partai Golkar*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu;
- b) David Reeve. 2013. *Golkar: Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika*. Depok: Komunitas Bambu.
- c) Isharyanto. 2017. *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: CV. Absolute Media;
- d) Jahja Muhaimin. 1971. *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada;
- e) Jusuf Wanandi. 2014. *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*. Jakarta: Kompas;
- f) Leo Surya Dinata. 1992. *Golkar Dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES.

²⁴ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hal. 106.

2) Karya Tulis (Majalah Jurnal, Skripsi dsb)

- a) Abdul Rahman Mawazi. 2017. “Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”, *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, vol. 6 no. 2.
- b) Ach Busairi. 2016. “Dualisme Kepemimpinan Dalam Partai Golkar”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- c) Anonim. “Demokrasi Di Bawah Cengkeraman Oligarki”, *Majalah, Prisma*, Jakarta: LP3ES, 2014, XXXIII
- d) G. Moedjanto. 1997. “Kalau Golkar Kalah, Harus Buat Surat Pernyataan Bebas Golkar”, *Majalah*, Jakarta: D&R.

3) Sumber Lisan

- a) Bapak H. Rizal Khaerul, S. Ip, M.Si (Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Kota Bandung);
- b) Bapak Sofyanudin Syarif, Sm.Hk (Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kota Bandung).

4) Tulisan di Internet

- a) Andrian Salam Wiyono, “PDIP Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kota Bandung”, dalam <https://www.merdeka.com/politik/pdip-raih-kursi-terbanyak-di-dprd-kota-bandung.html>, diakses pada tanggal 19 Marer 2021 jam 20.03 WIB;

- b) Annisa Nursalsabillah, “Ini 50 Nama Anggota DPRD Kota Bandung Terpilih Periode 2014-2019”, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4635036/ini-50-nama-anggota-dprd-kota-bandung-terpilih-periode-2019-2024>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021 jam 20.28 WIB;
- c) Fitria Chusna Farisa, “Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 Yang Ditetapkan KPU” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021 jam 17.12 WIB;
- d) Indira Ardanareswari, “Sejarah Pemilu 1977: Taktik Fusi Parpol ala Soeharto & Orde Baru”, dalam <https://tirto.id/sejarah-pemilu-1977-taktik-fusi-parpol-ala-soeharto-orde-baru-dl3V>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021 jam 15.06 WIB.

2. Kritik

Kritik sumber adalah tahapan penilaian atau pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan dilihat dari sudut pandang nilai kebenarannya. Kebenaran dari sumber-sumber sejarah ini dapat diteliti orisinalitasnya maupun kredibilitasnya, sehingga benar-benar dapat teruji keasliannya.²⁵

Kritik dibagi menjadi dua macam, yaitu, kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern berkaitan dengan orisinalitas atau keaslian sumber tersebut. Kritik ini

²⁵ Kuntowijoyo, *Loc cit*, hal. 77.

bertujuan untuk menganalisis apakah sumber-sumber yang diperoleh merupakan sumber primer atau hanya sumber sekunder. Kritik ekstern juga berupaya meneliti utuh atau tidaknya sumber-sumber yang diperoleh. Kritik ekstern pada umumnya meneliti sumber-sumber sejarah berdasarkan gaya tulisan, bahasa, warna kertas, serta bentuk fisik dan jenis kertas berupa buku, dokumen, maupun karya tulis yang akan digunakan peneliti sebagai sumber.²⁶

a. Kritik Eksternal

Kritik ekstern merupakan tahapan awal dalam melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” sumber sejarah. Sebelum semua kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh sejarawan atau peneliti sejarah dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan yang ketat.²⁷ Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sumber yang akan digunakan asli dan dapat dipercaya atau tidak. Menurut E. Kosim (1984; 39-40) dan Nina Herlina (2008; 25-30), ada tiga pertanyaan yang diajukan untuk menentukan kelayakan sumber yang digunakan, adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehendaki?

Pertanyaan ini memiliki keterkaitan dengan keaslian sumber sejarah yang digunakan, apakah asli atau palsu. Dalam penelitian ini, penulis meneliti sumber-

²⁶ I Gede Widja, *Sejarah Lokal: Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1989), hal. 24.

²⁷ Sulasman, *Teori Dan Metodologi Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 102.

²⁸ Ading Kusdiana dan Samsudin, *Panduan Penyusunan Dan Penulisan Skripsi Sejarah Dan Peradaban Islam*, (Bandung: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), hal. 30-31.

sumber sejarah dengan mengidentifikasi kapan ditulis dan diterbitkannya sumber tersebut, serta identifikasi terhadap tulisan tangan maupun bahasa yang digunakan.

Pada sumber pertama yang berkaitan dengan arsip atau dokumen berkaitan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Tahun 2009 dan 2019, SK Kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bandung periode 2009-2015 (Hasil Penyempurnaan), 2016-2020, dan 2016-2020 (Hasil Penyempurnaan). Bahan yang digunakan pada arsip atau dokumen tersebut menggunakan kertas HVS, diketik menggunakan komputer, dan telah berbentuk *print out*. Dalam arsip atau dokumen tersebut (terutama SK Kepengurusan) menggunakan *watermark* dari DPD Partai Golkar Kota Bandung.

Selain itu, dalam buku hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Tahun 2009 dan 2016, buku tersebut menggunakan bahan kertas HVS dan telah diketik menggunakan komputer, serta menggunakan penulisan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

2) Apakah sumber itu asli atau turunan?

Pertanyaan ini berkaitan dengan bentuk fisik yang digunakan dalam sumber tersebut. Sumber-sumber primer (terutama arsip atau dokumen) yang digunakan merupakan sumber asli karena sumber tersebut ditulis dan diterbitkan tahun 2010an yang artinya sumber tersebut dapat dipertahankan keasliannya. Namun dilihat dari bentuk fisik sumber-sumber sejarah yang digunakan, maka sumber tersebut adalah asli.

3) Apakah sumber itu utuh atau telah berubah-ubah?

Pertanyaan ini memiliki keterkaitan untuk mengungkapkan keutuhan dari sumber yang digunakan atau sumber yang didapatkan telah mengalami perubahan. Sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber yang masih utuh berkaitan dengan bentuk dan isi tulisan yang digunakan. Untuk sumber-sumber primer yang digunakan tidak mengalami perubahan yang berarti.

Maka bahwa sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya karena sumber-sumber tersebut didapatkan langsung dari DPD Partai Golkar Kota Bandung sehingga sumber-sumber tersebut dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

b. Kritik Internal

Setelah memperoleh informasi melalui wawancara dan dokumen, berikutnya dilakukan kritik internal. Kritik internal adalah menguji kebenaran informasi suatu dokumen.²⁹ Penulis melakukan kritik internal dengan tujuan untuk mencari nilai pembuktian yang sebenarnya dari isi sumber sejarah. Kritik ini dilakukan terutama untuk menentukan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya atau tidak.

Tujuan dari kritik intern adalah untuk menjawab pertanyaan: Apakah sumber yang diperoleh merupakan sumber yang kredibel atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut mengutip apa yang dikemukakan oleh E. Kosim (1984: 40-42) dan Nina Herlina (2008: 30-36), langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:³⁰

²⁹ A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 73.

³⁰ Ading Kusdiana dan Samsudin, *Op cit*, hlm. 31.

- 1) Melakukan penilaian intrinsik terhadap sumber yaitu:
 - a) Melakukan penilaian terhadap sifat sumber: Sumber primer yang didapatkan dalam penelitian ini terdiri dari sumber tulisan dan sumber lisan. Sumber primer tersebut menurut penulis memiliki keterkaitan satu sama lainnya karena sumber-sumber tersebut saling melengkapi, baik sumber tulisan maupun sumber lisan;
 - b) Menyoroti pengarang sumber, yang meliputi: Pertama, apakah ia mampu untuk memberikan kesaksian? Untuk menjawab pertanyaan ini, narasumber mampu memberikan kesaksian. Selanjutnya apakah ia mampu menyampaikan kebenaran? Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, narasumber yang penulis jumpai mampu memberikan kesaksian sesuai dengan pertanyaan yang penulis ajukan. Kesemua dari dua pertanyaan ini sangat bergantung pada: 1) Kehadiran saksi di waktu peristiwa itu terjadi, 2) Keahlian saksi, dan 3) Kedekatan saksi dengan peristiwa. Tiga unsur tersebut menjadi kriteria dari sumber primer yang didapatkan penulis dari narasumber yaitu para pengurus-pengurus yang ada di DPD Partai Golkar Kota Bandung. Kemudian kedua, apakah ia mampu memberikan kesaksian yang benar dan apakah ia mau menyampaikan kebenaran? Sejauh ini, narasumber yang penulis wawancarai bersedia memberikan kesaksiannya walaupun narasumber tersebut hanya sebatas para pengurus DPD Partai Golkar Kota Bandung. Selain itu, ada beberapa

data yang narasumber belum bersedia dikeluarkan atau dipublikasikan.

2) Komparasi sumber/Membanding-bandingkan sumber

Komparasi dilakukan dengan cara membanding-bandingkan setiap sumber yang didapatkan. Untuk penelitian ini penulis membandingkan sumber-sumber tulisan dan lisan, terutama sumber primer yang penulis dapatkan terkait keberadaan Partai Golkar di Kota Bandung.

3) Korbokasi/Pendukungan antar sumber

Korbokasi dilakukan dengan cara menguraikan fakta-fakta sejarah yang ditemukan dari setiap sumber. Tujuan adanya korbokasi itu sendiri adalah untuk menemukan keterkaitan antar sumber dalam menjelaskan fakta-fakta sejarah yang diteliti sehingga dengan melaksanakan tahapan korbokasi dapat menguraikan fakta-fakta sejarah yang ditemukan dalam setiap sumber yang penulis dapatkan. Dalam hal ini, penulis melakukan korbokasi dengan antara sumber-sumber tertulis (dalam hal ini sumber primer) dengan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan Partai Golkar di Kota Bandung. Penulis menemukan fakta sejarah bahwa Keberadaan Partai Golkar di Kota Bandung dinisiasi oleh pendirian Partai Golkar di tingkat pusat dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu partai politik yang diperhitungkan di Indonesia. Selain itu, sumber sekunder yang digunakan sebagai penopang utama bagi penelitian ini. Sehingga sumber sekunder tersebut dapat membantu penulisan ini menjadi tulisan yang baik dan benar.

Setelah melakukan proses tahapan kritik ekstern dan intern maka dapat diketahui bahwa sumber-sumber primer yang penulis dapatkan dapat

dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya. Sehingga sumber-sumber primer tersebut layak dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah suatu upaya peneliti melihat kembali tentang sumber-sumber yang didapatkan apakah sumber yang didapatkan saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian interpretasi merupakan tahapan untuk menguraikan, menganalisis, serta mengumpulkan semua sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan fakta-fakta yang ada.³¹ Dalam hal ini sumber-sumber yang penulis dapatkan antara informasi pernyataan hasil wawancara mengenai sejarah dan perkembangan partai Golkar di Kota Bandung dengan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan.

Keberadaan Partai Golkar di Kota Bandung tidak dapat dipisahkan dari dinamika Golkar di level pusat. Karena pada sekitar tahun 1964-1965 ketika partai Golkar masih bernama Sekber Golkar (Golongan Karya), sekretariatnya sudah ada baik di tingkat pusat sampai tingkat kelurahan.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah yang penulis lakukan. Tahapan ini merupakan langkah penulisan sejarah yang disusun secara logis, menurut urutan kronologis dan tema yang jelas serta mudah dipahami yang dilengkapi dengan pengaturan bab atau bagian-bagian yang dapat membangun urutan kronologis dan tematis. Penelitian ini berdasarkan fakta-fakta

³¹ Dudung Abdurrahman, *Loc cit*, hal. 65.

yang semula merupakan fakta-fakta yang terpisah-pisah antara satu dengan yang lain menjadi satu rangkaian peristiwa yang masuk akal. Artinya dalam suatu penelitian yang dimulai dengan tahapan heuristik, kritik, dan interpretasi tidak akan terungkap tanpa dibuat suatu kesimpulan dalam bentuk karya tulis ilmiah.³²

Fungsi historiografi ini adalah menyampaikan informasi kepada orang banyak dalam memberikan jawaban terhadap perumusan yang diajukan.³³ Maka penulis menuliskannya menjadi sebuah peristiwa sejarah. Adapun sitematika penulisan adalah sebagai berikut:

- a. **BAB I**, pada tahap ini terdapat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan langkah-langkah penelitian;
- b. **BAB II**, menjelaskan sejarah Partai Golkar secara umum, sejarah Partai Golkar di Kota Bandung, serta paradigma dari Partai Golkar;
- c. **BAB III**, menjelaskan terkait perkembangan Partai Golkar di Kota Bandung periode dan respon masyarakat terhadap Partai Golkar di Kota Bandung;
- d. **BAB IV**, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari pokok-pokok pembahasan dan saran.

³² Kuntowijoyo, *Loc cit*, hal. 81.

³³ Sulasman, *Loc cit*, hal. 148.